

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem tata kelola yang tepat untuk sebuah lembaga, atau *Good Corporate Governance* (GCG), sangat penting, terutama di era globalisasi saat ini. Setiap entitas publik harus mampu memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atas hasil kinerja yang dilakukan, serta informasi yang jelas dan transparan. Sebagai unit terkecil dari pemerintah, sesuai dengan rencana yang dievaluasi dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, desa juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan komitmen dan fungsinya. Agar setiap pemerintah desa dapat mendukung masyarakat, melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana, dan mewujudkan masyarakat desa yang sejahtera, sistem keuangan desa yang dikelola tidak hanya harus transparan, partisipatif, dan mampu dilakukan secara tertib dan disiplin (Gayatri dan Latrini, 2018).

Setiap desa wajib menerima sejumlah uang yang cukup dari dana perimbangan kabupaten/kota dalam APBD dan harus dikelola secara efektif dan transparan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh DPR. Untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan standar hidup di sana, desa-desa diberikan kebebasan yang luas dalam bagaimana mereka mengelola pemerintahan mereka sendiri, termasuk dalam bagaimana pembangunan desa dilaksanakan. Pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk mengelola kekayaan dan keuangan milik desa, sehingga pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dengan menyusun laporan keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel (Pujanira, 2017).

Sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, laporan hasil pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu cara agar masyarakat bertanggung jawab atas kinerja. Setiap laporan keuangan desa yang disampaikan harus berkaliber tertinggi dan transparan kepada masyarakat umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa laporan keuangan

berikutnya nantinya akan digunakan oleh semua organisasi sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan dan pilihan untuk pengelolaan pemerintahan. Informasi yang diberikan merupakan salah satu tanda laporan keuangan yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan dianggap berkualitas baik apabila data yang dikandungnya akurat, konsisten, sebanding, dan mudah dipahami. Jika informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Desa sudah memenuhi kriteria tersebut mengindikasikan pemerintah desa dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Puspasari dan Purnama, 2018).

Tawaqal dan Suparno (2017) menyatakan bahwa salah satu hal yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Keuangan Desa yang digunakan. Dengan membuat aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes), pemerintah, Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. BPKP mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) untuk meningkatkan efektivitas tata kelola keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, terpercaya, dan andal. Menurut penelitian Gayatri dan Latrini (2018), penerapan sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) membantu desa menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan efektif dan efisien sekaligus meningkatkan kualitas laporannya. Hal yang dapat memperlancar proses implementasi Siskeudes yang dilakukan oleh aparatur desa, sehingga dapat memengaruhi hasil dari peningkatan kualitas laporan keuangan desa yaitu dengan memanfaatkan teknologi secara tepat (Puspasari dan Purnama, 2018).

Pembuatan laporan keuangan desa tidak hanya menyangkut tentang perlunya sistem informasi dan *software* akuntansi khusus yang memadai, namun juga harus diimbangi dengan Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi (Pujanira, 2017). Agar dapat berkontribusi secara efektif terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi, perlu adanya jaminan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara efektif karena sumber daya manusia merupakan salah satu unsur organisasi yang paling signifikan (Sembiring, 2013). Pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam hal melaksanakan tugas

yang diberikan kepadanya menunjukkan sifat-sifat manusia yang dapat dianggap memiliki kompetensi. Sumber daya manusia dengan tingkat kompetensi yang tinggi akan dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif, efisien, dan ekonomis, mencegah hilangnya waktu dan uang. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan dapat dikurangi dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas karena individu-individu tersebut sudah memiliki pemahaman tentang apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai jadwal.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang dikembangkan untuk memberikan keyakinan yang cukup memadai bahwa efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan tersebut pemerintah akan tercapai. Pengendalian internal mengacu pada kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan, memberikan data keuangan yang akurat, dan menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan Tawaqal dan Suparno (2017), sistem pengendalian internal menggambarkan seberapa baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan artinya semakin baik sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi maka akan semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Penelitian ini memiliki objek penelitian di seluruh desa di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimum dan Proporsional di tiap Kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 menunjukkan bahwa Kecamatan Bangorejo merupakan desa strategis dan menguntungkan, baik dari

segi pertanian, bisnis dan sosial budaya yang memiliki jumlah ADD terbesar di Kabupaten Banyuwangi. Alasan penulis mengambil objek penelitian ini karena terdapat masalah dalam pengoperasian Siskeudes, yaitu belum optimalnya pemahaman pada pengoperasian Siskeudes, kurangnya tenaga sumber daya manusia meskipun telah dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Siskeudes, serta munculnya keluhan gangguan sistem dari beberapa aparat pemerintah desa terkait Siskeudes yang selalu di *update* pemerintah pusat. Sistem yang diharapkan mampu menciptakan efektivitas dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, kenyataannya masih menimbulkan permasalahan dalam penerapan Siskeudes. Sehingga sistem tersebut dirasa belum maksimal dan efektif.

Dari uraian di atas akan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu sudah meneliti hal yang sama tetapi dengan obyek yang berbeda. Penelitian kali ini akan membahas tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas laporan Keuangan Desa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah sistem keuangan desa berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis dan menguji pengaruh sistem keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 2 Menganalisis dan menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan desa
- 3 Menganalisis dan menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan desa

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai isu yang sama, serta memperkaya pengetahuan pembaca dengan menjadi bahan bacaan, khususnya terkait dengan kaliber neraca keuangan pemerintah desa.

2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Masukan atau pertimbangan terkait sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini kepada pemerintah desa di wilayah Desa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi, sebagai sumber data dan faktor dalam pengambilan kebijakan.

3. Penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang kualitas laporan keuangan desa dan juga penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan informasi bagi penelitian selanjutnya untuk penyelesaian skripsi terkait kualitas laporan keuangan desa.